

Implementasi pengelolaan keuangan pada sekolah multijenjang: studi kasus di sekolah indonesia kuala lumpur

Dinda Nur Maulidia

Program studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: sajadinda714@gmail.com

Kata Kunci:

Implementasi; Pengelolaan Keuangan; Sekolah Multijenjang

Keywords:

Implementation; Management Finance ; Multilevel School

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) sebagai sekolah multijenjang yang mencakup jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap bendahara sekolah, penelitian ini mengungkap strategi perencanaan, penyaluran, serta pengawasan dana dari berbagai sumber, yaitu APBN (Adikbud), dana Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan Dana Dukungan Kegiatan Sekolah (DDKS), dengan sistem pengelolaan berbasis reimbursement dan pengajuan proposal. Hasil

wawancara menunjukkan bahwa meskipun tidak ada pemisahan alokasi dana berdasarkan jenjang pendidikan, proses pengelolaan dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengawasan berlapis. Tantangan utama dalam pengelolaan keuangan adalah ketepatan waktu pelaporan dan keterbatasan anggaran akibat pemangkasan dana. Teknologi berperan terbatas, dengan pemanfaatan aplikasi sederhana seperti Excel dan pengarsipan digital. Rekomendasi dari bendahara menekankan pentingnya tanggung jawab individu, sinkronisasi lintas divisi, dan peningkatan transparansi, khususnya terhadap guru dan wali murid. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan sistem manajemen keuangan di sekolah multijenjang lainnya.

ABSTRACT

This study aims to know implementation of financial management at Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) as a multilevel school that includes PAUD, TK, SD, SMP, and SMA levels. Through a qualitative approach with an in-depth interview method with the school treasurer, this research reveals the strategy of planning, distributing, and monitoring funds from various sources, namely the state budget (Adikbud), Indonesian Schools Abroad (SILN) funds, and School Activity Support Funds (DDKS) with a reimbursement-based management system and proposal submission. Interviews showed that although there is no separation of fund allocations by education level, the management process is integrated with multiple levels of supervision. The main challenges in financial management are the timeliness of reporting and budget limitations due to funding cuts. Technology plays a limited role, with the use of simple applications such as Excel and digital filing. Recommendations from the treasurer emphasize the importance of individual responsibility, cross-divisional synchronization and increased transparency, especially towards teachers and guardians. The findings are expected to inform the evaluation and development of financial management systems in other multilevel schools.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam penyelenggaraannya, pendidikan memerlukan dukungan sistem manajemen yang baik, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Sekolah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

sebagai lembaga pendidikan dituntut untuk dapat mengelola keuangannya secara efektif dan efisien guna menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Tantangan semakin kompleks ketika sekolah memiliki struktur multijenjang, karena kebutuhan dan karakteristik tiap jenjang berbeda namun tetap harus dikelola dalam satu sistem keuangan yang terintegrasi (Mulyasa, 2013). Pengelolaan keuangan dalam sektor pendidikan merupakan komponen penting yang menunjang tercapainya pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan. Di Indonesia, manajemen keuangan pada lembaga pendidikan meliputi berbagai proses, mulai dari tahap perencanaan, distribusi anggaran, hingga pelaporan penggunaan dana. Setiap sekolah atau institusi pendidikan harus memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal (Ahyani, E., & Duhani, 2024). Implementasi dalam pengelolaan keuangan sekolah menunjukkan sejauh mana strategi yang diterapkan mampu mencapai tujuan penggunaan dana secara tepat sasaran, efisien, dan transparan. Strategi di sini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan atau evaluasi menurut (Fred R. David, 2011). Dalam konteks sekolah multijenjang, strategi yang diterapkan harus fleksibel, menyeluruh, dan adaptif terhadap kebutuhan masing-masing jenjang. Hal ini menjadi dasar penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana sekolah.

Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) merupakan salah satu dari Sekolah Indonesia yang berada di Luar Negeri (SILN) yang ada di 11 negara yang tersebar di seluruh dunia. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) tepatnya berdiri pada 10 Juli 1969, yang berlokasi di No. 1 Lorong Tun Ismail 50480, wilayah persekutuan Kuala Lumpur Malaysia. SKIL konsisten berkiprah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Indonesia di Malaysia yang mengacu pada dasar pendidikan nasional (Ahsani et al., 2020). Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) merupakan salah satu contoh sekolah multijenjang di luar negeri yang menyelenggarakan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA. SIKL memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, seperti APBN (melalui Adikbud), dana SILN, serta kontribusi dari orang tua siswa yaitu Dana Dukungan Kegiatan Sekolah (DDKS). Pengelolaan dana di SIKL dilaksanakan secara terpusat dengan sistem reimburse dan pelaporan berjenjang, serta menggunakan media digital sederhana seperti Excel dan penyimpanan cloud. Kompleksitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas dan akuntabilitas strategi pengelolaan keuangan sekolah. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan yang diterapkan di SIKL. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta inovasi yang telah atau dapat diterapkan dalam sistem keuangan sekolah multijenjang. Melalui studi kasus terhadap bendahara sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan manajemen keuangan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah serupa di luar negeri.

Pembahasan

Perencanaan Dan Penyaluran Dana

Pengelolaan keuangan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dan berorientasi pada efektivitas serta akuntabilitas

penggunaan dana. Strategi pendanaan yang diterapkan SIKL mencerminkan pendekatan manajemen keuangan publik yang berupaya menyesuaikan jenis kegiatan dengan sumber dana yang sesuai. Dana dari pemerintah melalui Adikbud dan SILN digunakan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan langsung dengan kurikulum dan operasional sekolah, sedangkan dana dari masyarakat (DDKS) digunakan untuk kegiatan yang bersifat kesiswaan. Hal ini menunjukkan adanya distribusi peran dalam pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS), Prinsip-prinsip manajemen keuangan seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi merupakan landasan yang mendasar dalam menjaga keberlanjutan operasional sekolah (Khofi & Wafi, 2025). Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang tepat, sekolah tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memaksimalkan dampak positif terhadap kualitas Pendidikan.

Sistem pencairan dana menggunakan mekanisme reimburse menuntut pihak sekolah untuk memiliki dana cadangan terlebih dahulu, serta kemampuan administratif yang kuat dalam menyusun laporan dan berkoordinasi dengan pihak Adikbud. Ini sejalan dengan BPK RI keuangan negara termasuk dana pendidikan harus dikelola secara tertib ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan pada awal tahun serta kewajiban menyampaikan laporan perubahan ketika ada penyesuaian kebutuhan, menunjukkan adanya siklus pengelolaan keuangan yang disiplin dan terencana. Dalam hal kegiatan non-kurikuler seperti outing class, pendekatan mandiri yang dilakukan oleh wali kelas dan orang tua siswa mencerminkan praktik desentralisasi keuangan yang fleksibel, namun tetap terkendali. Pendanaan ini dilakukan di luar sistem resmi sekolah karena tidak dapat dibiayai dari dana APBN maupun DDKS. Strategi ini menunjukkan kemampuan sekolah dalam mengadaptasi sumber daya keuangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang lebih variatif, tanpa melanggar prosedur administratif utama.

Dari sisi teknologi, pengelolaan keuangan di SIKL masih bersifat konvensional dan belum berbasis sistem informasi manajemen keuangan secara menyeluruh. Penggunaan aplikasi sederhana seperti Microsoft Excel dan Google Drive cukup memadai untuk keperluan pencatatan dan pengarsipan, namun masih terbatas dalam hal otomatisasi, pelacakan transaksi, serta integrasi antarbagian. Menurut (Halim, A., & Kusufi, 2012) penggunaan teknologi informasi dalam sistem keuangan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi jika diterapkan dengan tepat. Walaupun SIKL menyadari potensi aplikasi seperti Mayabi keputusan untuk belum mengimplementasikannya secara penuh menunjukkan adanya pertimbangan terhadap urgensi dan relevansi kebutuhan sekolah yang berbeda dengan institusi bisnis. Artinya, prinsip kesesuaian teknologi dengan kebutuhan organisasi telah menjadi acuan dalam pemilihan sistem pengelolaan. Penerapan sistem pelaporan keuangan yang terstandar dan terdokumentasi dengan baik berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana pada lembaga pendidikan (Ahmad 'Azam 'Ulwan, 2023). Secara keseluruhan, strategi pengelolaan keuangan di SIKL telah mencerminkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Namun, penguatan dalam hal pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan sangat mendukung pengembangan sistem keuangan sekolah multijenjang yang lebih adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan publik. (Sulistiani, 2020) menegaskan bahwa lemahnya sistem pelaporan keuangan sering kali disebabkan oleh keterbatasan kompetensi akuntansi pengelola keuangan, sehingga laporan keuangan belum disusun sesuai standar yang ditetapkan. Sistem pengawasan keuangan yang diterapkan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* dan manajemen keuangan publik yang akuntabel. *Good Governance* adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab (Prokomsetda, 2017). Pengawasan dilakukan secara berjenjang dan sistematis, dengan pembagian peran yang jelas antara penanggung jawab kegiatan, bendahara sekolah, Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Adikbud), serta unit validasi keuangan. Proses pelaporan dan verifikasi yang ketat ini menunjukkan bahwa SIKL telah mengimplementasikan kontrol internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2019) yang menyatakan bahwa sistem pengawasan yang baik harus mampu memastikan keuangan publik dikelola dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Tahapan pengawasan yang dimulai dari penyusunan laporan oleh penanggung jawab kegiatan hingga pencairan melalui bagian keuangan Adikbud memperlihatkan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana pengendalian kebijakan, di mana setiap laporan harus sesuai dengan prioritas dan kebijakan pendanaan pemerintah. Proses ini juga menunjukkan penerapan *prinsip checks and balances* dalam manajemen keuangan, seperti yang disarankan oleh (Halim, A., & Kusufi, 2012) bahwa pengawasan harus dilihat sebagai proses berkelanjutan, bukan hanya tindakan pasca kegiatan. Sementara itu, dana dari Dana Dukungan Kegiatan Sekolah (DDKS) yang bersumber dari orang tua siswa diawasi dengan mekanisme tersendiri, tetapi tetap menjaga prinsip yang sama. Proses pelaporan dimulai dari PJ kegiatan, diverifikasi oleh bendahara DDKS, lalu oleh bendahara sekolah, dan akhirnya diperiksa oleh komite sekolah. Keterlibatan komite dalam proses ini memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran sekolah, suatu ciri khas dari manajemen berbasis sekolah (MBS). Dalam konteks ini, komite berfungsi sebagai representasi masyarakat yang memastikan bahwa kontribusi keuangan dari orang tua digunakan secara tepat dan transparan.

Perbedaan alur antara dana pemerintah dan dana masyarakat mencerminkan kebutuhan akan fleksibilitas dalam pengelolaan berbagai sumber dana di sekolah multijenjang. Namun demikian, keduanya dibingkai dalam sistem pelaporan berjenjang yang paralel, yang menguatkan akuntabilitas dan menciptakan kepercayaan publik. Sebagaimana ditegaskan oleh (Hidayah et al., 2025) kelola yang baik dapat memperbaiki keterbukaan informasi dan ketepatan laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan para pemangku. Dengan pendekatan tersebut, SIKL telah menunjukkan kematangan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang multijenjang dan multikebutuhan.

Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan pada sekolah multijenjang seperti Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang berkaitan dengan akuntabilitas dan efektivitas manajerial. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah kesulitan dalam mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari penanggung jawab (PJ) terutama karena struktur organisasi yang kompleks dan banyaknya pihak terlibat lintas jenjang. Keterlambatan pelaporan yang meskipun hanya 1–2 hari tetap berdampak pada proses pencairan dana dan efisiensi anggaran secara keseluruhan. Hal ini mencerminkan bahwa penguatan disiplin administrasi dan kepatuhan waktu menjadi aspek penting dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik.

Selain persoalan administratif, pemangkasan anggaran dari pusat juga menjadi tantangan yang signifikan. Dalam beberapa kasus, perbedaan antara RAB yang diajukan dan dana yang disetujui menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian skala kegiatan atau efisiensi penggunaan dana. Misalnya, ketika RAB sebesar 10 juta rupiah hanya disetujui sebesar 8 juta, sekolah perlu mengatur kembali alokasi dan prioritas kegiatan agar tetap berjalan tanpa melampaui batas dana yang tersedia. Menurut (Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, 1989) efektivitas dalam organisasi tercermin dari kemampuannya beradaptasi terhadap keterbatasan sumber daya tanpa mengabaikan tujuan strategis. Dalam konteks ini, SIKL menunjukkan kemampuan adaptif yang penting dalam menghadapi fluktuasi kebijakan anggaran pemerintah. Lebih jauh, tantangan pengelolaan keuangan di SIKL juga kurangnya koordinasi lintas divisi. Sinkronisasi yang berjalan lambat menyebabkan keterlambatan dalam verifikasi laporan dan pencairan dana, yang pada akhirnya menghambat kelancaran pelaksanaan program sekolah. Hal ini sesuai dengan pandangan (Drucker, 1995) yang menekankan bahwa strategi yang baik harus diikuti dengan eksekusi yang cepat dan terkoordinasi agar efisiensi organisasi dapat tercapai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas komunikasi dan koordinasi antarunit menjadi langkah strategis untuk mendukung efektivitas keuangan.

Dari sisi transparansi, SIKL saat ini lebih menekankan alur informasi keuangan secara vertikal, yaitu dari bendahara kepada pimpinan. Namun, terdapat dorongan untuk memperluas transparansi ke tingkat operasional termasuk guru, wali kelas, dan wali murid, terutama terkait dana DDKS yang berasal dari kontribusi masyarakat. Informasi ini mulai disampaikan oleh komite kepada sekolah dan selanjutnya diteruskan kepada wali kelas untuk disampaikan kepada orang tua. Inisiatif ini merupakan langkah awal dalam membangun sistem komunikasi dua arah yang partisipatif, sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang mengedepankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Jika dikembangkan lebih lanjut, pola ini berpotensi memperkuat kepercayaan publik dan memperbaiki akuntabilitas keuangan secara menyeluruh. Dalam penelitian menemukan bahwa pada lembaga pendidikan berbasis keagamaan, pengelolaan dan pelaporan keuangan masih dilakukan secara sederhana dengan sistem pencatatan single entry serta belum sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan PSAK 45, yang berdampak pada rendahnya tingkat akuntabilitas

dan transparansi keuangan (Dwi Sulistiani, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab publik, implementasi tata kelola keuangan yang sistematis masih menghadapi berbagai kendala struktural dan administratif. Temuan tersebut relevan dengan konteks pengelolaan keuangan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) sebagai sekolah multijenjang, di mana pengelolaan dana dilakukan secara terpusat dan berjenjang, namun masih menghadapi tantangan pada aspek ketepatan pelaporan, keterbatasan anggaran, serta pemanfaatan teknologi keuangan yang belum optimal.

Kesimpulan dan Saran

Pengelolaan keuangan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) dilakukan secara terpusat dan terintegrasi untuk seluruh jenjang pendidikan tanpa pemisahan dana berdasarkan level pendidikan. Sumber dana utama berasal dari APBN melalui Adikbud, dana Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan Dana Dukungan Kegiatan Sekolah (DDKS) dari orang tua siswa, dengan sistem pengelolaan berbasis reimburse dan pengajuan proposal. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran akibat pemangkasan dana serta ketepatan waktu pelaporan keuangan. Teknologi yang digunakan masih sederhana, yaitu aplikasi Excel dan penyimpanan digital melalui Google Drive, sehingga efisiensi pelaporan dan dokumentasi tetap terjaga meski belum optimal. Pengawasan keuangan dilakukan secara berjenjang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Rekomendasi dari bendahara sekolah menekankan pentingnya tanggung jawab individu, sinkronisasi lintas divisi, dan peningkatan transparansi kepada guru serta wali murid. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan sistem manajemen keuangan di sekolah multijenjang lainnya, khususnya di luar negeri.

Berdasarkan hasil penelitian implementasi pengelolaan keuangan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) disarankan untuk mendukung peningkatan disiplin dan tanggung jawab penanggung jawab kegiatan dalam menyusun serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu. Keterlambatan pelaporan, meskipun relatif singkat, berdampak pada kelancaran proses verifikasi dan pencairan dana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen administratif serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas penanggung jawab kegiatan agar efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah dapat terus ditingkatkan. Selain itu, pengelolaan keuangan di sekolah multijenjang menuntut adanya koordinasi dan sinkronisasi lintas divisi yang lebih optimal. Kompleksitas struktur organisasi di SIKL memerlukan komunikasi yang efektif antarunit kerja agar perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dapat berjalan lebih efisien. Penguatan koordinasi ini diharapkan mampu meminimalisir hambatan administratif, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekolah.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi keuangan perlu terus dikembangkan. Meskipun saat ini SIKL telah menggunakan aplikasi sederhana dalam pencatatan dan pengarsipan keuangan, sekolah disarankan untuk mulai mempertimbangkan sistem informasi manajemen keuangan yang lebih terintegrasi sesuai kebutuhan. Di sisi lain, transparansi pengelolaan dana, khususnya Dana Dukungan

Kegiatan Sekolah (DDKS), perlu diperluas kepada guru dan wali murid agar tercipta kepercayaan serta partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan program sekolah.

Daftar Pustaka

- Ahmad 'Azam 'Ulwan, Y. (2023). Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Persediaan Di Koperasi Druju Kabupaten Malang Periode 2021-2022. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 22 (2). <https://repository.uin-malang.ac.id/>
- Ahsani, E. L. F., Lusiana, S. N. E., Mardiyah, U., Humaidah, H. N., & Safaah, R. N. (2020). Analisis Pembelajaran di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) dalam Upaya Mengembangkan Minat dan Bakat Siswa di Era New Normal. *Jurnal Kependidikan*, 8(1), 108–120. <https://doi.org/10.24090/jk.v8i1.4338>
- Ahyani, E., & Dhuhani, E. M. (2024). *Transformasi Digital dalam Manajemen Perkantoran Pendidikan: Sebuah Kajian Literatur*. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*. 12 (1). <https://doi.org/10.33394/vis.v12i1.10785>
- David, F. R. (2011). *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep* (12th ed.). Salemba Empat.
- Drucker, P. F. (1995). *Managing in a Time of Great Change*. Truman Talley Books.
- Dwi Sulistiani. (2020). Akuntansi Pesantren Sesuai SAK ETAP dan PSAK 45 dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pesantren. 3, 31–48. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v3i1.7198>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1989). *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. Business Publications.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. I. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Hidayah, D. N., Amalia, D. S., Ariella, N. K., Misidawati, D. N., & Purnama, N. T. (2025). Peran Ethical Governance Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Perusahaan. 1(April), 155–167.
- Khofi, M. B., & Wafi, I. (2025). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan di Sekolah : Implementasi dan Dampaknya. 3(April), 1–12.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Misbahuddin, A. A., & Prajawati, M. I. (2023). Pengaruh kecerdasan spiritual, pendapatan, dan hedonism lifestyle terhadap pengelolaan keuangan (studi kasus guru Pondok Pesantren An-Nur 3 “Murah Banyu” Malang). *Jurnal Manajemen Dan Inovasi (MANOVA)*, 6(1), 75-87. <https://repository.uin-malang.ac.id/14500/>
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.
- Prokomsetda. (2017). PENGERTIAN, PRINSIP DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA. <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>